

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM**

**PENGELOLAAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA**

**BOS DI UPTD SPF SD NEGERI MINTARAGEN**

 **SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Rangka Penyelesaian Studi

Strata 1 untuk Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Ekonomi

Oleh:

MELISSA NATHANIA SIMANJUNTAK

NPM 1320600007

# HALAM

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

# PERSETUJUAN



# PENGESAHAN

****

# PERNYATAAN



# MOTO DAN PERSEMBAHAN

**Moto:**

“Jangan takut nak, papa akan selalu ada di sisi Lisa”

-Papa-

**Persembahan:**

Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, laporan skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orang tua, kakak, sahabat, serta teman-teman yang selalu memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling sepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Karena mungkin ada suatu hal dibalik itu semua, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

# PRAKATA

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih-Nya yang tak terhingga, sehingga peneliti sanggup menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Penggunaan Anggaran Dana BOS di UPTD SPF SD Negeri Mintaragen”. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M. Hum selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Ibu Dr. Yoga Prihatin, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Neni Hendaryati, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi.
4. Ibu Dr. Dewi Amaliah Nafiati, S.Pd, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang membimbing saya dengan penuh keikhlasan selama penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan motivasi dengan tulus dalam menyampaikan materi perkuliahan selama ini.
6. Bapak/Ibu dan warga sekolah SD Mintaragen 5 yang sudah mengizinkan penelitian skripsi.
7. Cinta pertama dan panutanku. Alm. Papa Maruli Simanjuntak S.H. Yang telah memberikan teladan yang penuh dengan ketulusan, kejujuran dan kerja keras. Semoga engkau beristirahat dalam damai. Terima kasih atas cinta dan dedikasimu yang abadi.
8. Ibu tersayang, Martuti,S.Pd. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih sudah menjadi tempatku utuk pulang, bu.
9. Kakak pertamaku, Melinda Larasati Simanjuntak S.M. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat.
10. Untuk seseorang bernama May Hadi Riyanto. Terima kasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, doa yang telah senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini.
11. Sahabat saya Khumairoh Khalimatus Sadiyah yang telah memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.
12. Teman-teman KKN Angkatan 2020 yang sudah banyak memberikan kebaikan kepada saya.
13. Terakhir untuk diri saya sendiri, Melissa Nathania Simanjuntak atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

# ABSTRAK

**SIMANJUNTAK, MELISSA S, 2024,** *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Penggunaan Anggaran Dana BOS di UPTD SPF SD Negeri Mintaragen.* Skripsi. Pendidikan Ekonomi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Pancasakti Tegal.

Pembimbing I : Dr. Dewi Amaliah Nafiati, S.Pd, M.Si

Pembimbing II : Neni Hendaryati, M.Pd

Kata Kunci : *Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana BOS*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penggunaan anggaran dana BOS di UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Informan utama dalam penelitian ini meliputi Kepala Sekolah, Bendahara I, Bendahara II, Komite Sekolah dan Wali Murid. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode triangulasi berdasarkan sumber data yang berbeda dengan teknik yang sama. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapkan melalui 4 tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5 telah melakukan upaya yang signifikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Beberapa upaya tersebut meliputi penyusunan laporan keuangan secara berkala, keterbukaan dalam informasi pengelolaan anggaran kepada publik, serta adanya mekanisme pengawasan internal. Saran penelitian ini kepada UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5 diharapkan perlunya penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas manajemen keuangan sekolah, dan pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif dengan para pemangku kepentingan.

# ABSTRACT

**SIMANJUNTAK, MELISSA S, 2024,** *Analysis of Transparency and Accountability in Managing the Use of the BOS Fund Budget at UPTD SPF SD Negeri Mintaragen*. Research Project. Economic Education, Faculty of Teacher Training and Education. Pancasakti Tegal University.

First Advisor I : Dr. Dewi Amaliah Nafiati, S.Pd, M.Si

Second Advisor II : Neni Hendaryati, M.Pd

Keywords : *Transparency, Accountability, Management of BOS Funds*

This research aims to analyze the level of transparency and accountability in managing the use of the BOS budget at UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5. The research method used is a qualitative approach. The main informants in this research include the Principal, Treasurer I, Treasurer II, School Committee and Parents. The data obtained was explained using the triangulation method based on different data sources with the same technique. The data collection techniques are through observation, interviews and documentation. The data analysis technique is applied through 4 stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5 has made significant efforts to increase transparency and accountability in the management of BOS funds. Some of these efforts include the preparation of regular financial reports, openness of budget management information to the public, and the existence of internal monitoring mechanisms. This research's suggestions to UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5 include the need to strengthen the supervision system, increase school financial management capacity, and develop more effective communication strategies with stakeholders.

# DAFTAR ISI

[HALAMAN JUDUL i](#_Toc171325083)

[PERSETUJUAN ii](#_Toc171325084)

[PENGESAHAN 48](#_Toc171325111)

[PERNYATAAN iii](#_Toc171325085)v

[MOTO DAN PERSEMBAHAN v](#_Toc171325086)

[PRAKATA vi](#_Toc171325087)

[ABSTRAK viii](#_Toc171325088)

[ABSTRACT ix](#_Toc171325089)

[DAFTAR ISI x](#_Toc171325090)

[DAFTAR TABEL xii](#_Toc171325091)

[DAFTAR BAGAN xiii](#_Toc171325092)

[DAFTAR LAMPIRAN xiv](#_Toc171325093)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc171325094)

[1.1 Latar Belakang Masalah 1](#_Toc171325096)

[1.2 Identifikasi Masalah 6](#_Toc171325097)

[1.3 Pembatasan Masalah 6](#_Toc171325098)

[1.4 Rumusan Masalah 7](#_Toc171325099)

[1.5 Tujuan Penelitian 7](#_Toc171325100)

[1.6 Manfaat Penelitian 8](#_Toc171325101)

[BAB II LANDASAN TEORI 10](#_Toc171325102)

[2.1 Kajian Teori 10](#_Toc171325104)

[2.1.1 Transparansi 10](#_Toc171325105)

[2.1.2 Akuntabilitas 19](#_Toc171325106)

[2.1.3 Pengelolaan Dana BOS 29](#_Toc171325107)

[2.2 Kajian Terdahulu 39](#_Toc171325108)

[2.3 Kerangka Pikir 48](#_Toc171325109)

[2.4 Pertanyaan Penelitian 46](#_Toc171325110)

[BAB III METODE PENELITIAN 48](#_Toc171325111)

[3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian 48](#_Toc171325113)

[3.2 Prosedur Penelitian 50](#_Toc171325114)

[3.3 Sumber Data 51](#_Toc171325115)

[3.4 Wujud Data 52](#_Toc171325116)

[3.5 Identifikasi Data 52](#_Toc171325117)

[3.6 Teknik Pengumpulan Data 53](#_Toc171325118)

[3.7 Pengujian Kualitas Data 56](#_Toc171325119)

[3.8 Teknik Analisis Data 56](#_Toc171325120)

[3.9 Teknik Penyajian Hasil Analisis 59](#_Toc171325121)

[BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 60](#_Toc171325122)

[4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 60](#_Toc171325124)

[4.1 1 Sejarah Singkat UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5 60](#_Toc171325125)

[4.1 2 Profil Sekolah 60](#_Toc171325126)

[4.1 3 Visi dan Misi Sekolah 61](#_Toc171325127)

[4.1 4 Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab Pekerjaan 62](#_Toc171325128)

[4.1 5 Profil Partisipan 65](#_Toc171325129)

[4.2 Hasil Pengujian Data dan Analisis 65](#_Toc171325130)

[4.3 Pembahasan 81](#_Toc171325131)

[BAB V PENUTUP 99](#_Toc171325132)

[5.1 Kesimpulan 99](#_Toc171325134)

[5.2 Saran 100](#_Toc171325135)

[5.3 Keterbatasan Penelitian 101](#_Toc171325136)

[5.4 Agenda Penelitian Selanjutnya 102](#_Toc171325137)

[DAFTAR PUSTAKA 103](#_Toc171325138)

[LAMPIRAN 107](#_Toc171325139)

# DAFTAR TABEL

[Tabel 2. 1 Kajian Terdahulu 40](#_Toc171325274)

[Tabel 3. 1 Pedoman Lembar Observasi 54](#_Toc171325280)

[Tabel 3. 2 Pedoman Wawancara 55](#_Toc171325281)

[Tabel 4. 1 Profil Partisipan 65](#_Toc171325289)

[Tabel 4. 2 Rencana Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Per Tahap 85](#_Toc171325290)

[Tabel 4. 3 Penerimaan Dana Sekolah 88](#_Toc171325291)

[Tabel 4. 4 Laporan Monitoring Belanja BOSP UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5 Tahun 2024](#_Toc171325292) 89

[Tabel 4. 5 Laporan RKAS UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5 91](#_Toc171325293)

# DAFTAR BAGAN

[Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir 49](#_Toc171325912)

[Bagan 3. 1 Desain Penelitian 53](#_Toc171325913)

[Bagan 3. 2 Identifikasi Data 64](#_Toc171325921)

[Bagan 4. 1 Struktur Organisasi Sekolah 64](#_Toc171325921)

# DAFTAR LAMPIRAN

[Lampiran 1 Surat Izin Observasi 108](#_Toc171326418)

[Lampiran 2 Surat Pemberian Izin Observasi Awal 109](#_Toc171326419)

[Lampiran 3 Persetujuan Identifikasi Masalah 110](#_Toc171326420)

[Lampiran 4 Pedoman Observasi 113](#_Toc171326421)

[Lampiran 5 Lembar Observasi 118](#_Toc171326422)

[Lampiran 6 Hasil Observasi 122](#_Toc171326423)

[Lampiran 7 Surat Rekomendasi Penelitian 114](#_Toc171326424)

[Lampiran 8 Berita Acara Seminar Proposal 137](#_Toc171326425)

[Lampiran 9 Keikutsertaan Seminar Proposal 137](#_Toc171326425)

[Lampiran 10 Surat Permohonan Izin Penelitian 138](#_Toc171326426)

[Lampiran 11 Surat Pemberian Izin Penelitian 108](#_Toc171326418)

[Lampiran 12 Surat Selesai Penelitian Dari UPS 109](#_Toc171326419)

[Lampiran 13 Surat Selesai Penelitian Dari SD Mintaragen 5 110](#_Toc171326420)

[Lampiran 14 Lembar Wawancara 113](#_Toc171326421)

[Lampiran 15 Hasil Wawancara 118](#_Toc171326422)

[Lampiran 16 Daftar Nama Pembagian Tugas Guru 122](#_Toc171326423)

[Lampiran 17 Data Gedung SD Mintaragen 5 138](#_Toc171326424)

[Lampiran 18 Daftar Pendidik 137](#_Toc171326425)

[Lampiran 19 Data Inventaris Sekolah 138](#_Toc171326426)

[Lampiran 20 Jumlah Peserta Didik 139](#_Toc171326418)

[Lampiran 21 Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 140](#_Toc171326419)

[Lampiran 22 Buku Kas Umum 150](#_Toc171326420)

[Lampiran 23 Buku Pembantu Pajak 155](#_Toc171326420)

[Lampiran 24 Papan Dana BOS 2024 160](#_Toc171326422)

[Lampiran 25 Surat Plagiarisme IPI 165](#_Toc171326422)

[Lampiran 26 Jurnal Bimbingan Skripsi 166](#_Toc171326422)

[Lampiran 27 Berita Acara Ujian Skripsi 167](#_Toc171326418)

[Lampiran 28 Dokumentasi 168](#_Toc171326422)

[Lampiran 29 Biodata Penulis 188](#_Toc171326422)

#

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

 Pendidikan memiliki peran dalam pembangunan suatu negara. Pemerintah dan masyarakat mengakui bahwa investasi dalam sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat besar bagi perkembangan generasi muda dan pertumbuhan ekonomi ke depannya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia adalah dengan memberikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) kepada sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Dana BOS merupakan bentuk dukungan keuangan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan operasional pendidikan (Direktorat Sekolah Dasar, 2024).

Dana BOS adalah dana APBN yang digunakan untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku (Juanda, 2022). Pendanaan biaya operasional non-personalia tersebut digunakan antara lain untuk pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran, pembelian alat multimedia pembelajaran, pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan serta pengembangan manajemen sekolah. Selain itu, dana BOS juga dapat digunakan untuk penerimaan peserta didik baru, pengelolaan sekolah, langganan daya dan jasa, pembayaran honor, serta pemeliharaan dan perawatan sarana sekolah.

Pengelolaan dana BOS dalam praktiknya telah menjadi permasalahan yang rumit dan menuntut perhatian serius. Salah satu isu utama adalah penyimpangan dalam penggunaan dana BOS. Kasus-kasus penyimpangan sering terjadi, seperti penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi, pemalsuan laporan keuangan, dan pembelian barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Penyimpangan ini tidak hanya merugikan kualitas pendidikan tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan dana BOS. Transparansi, akuntabilitas, dan manajemen keuangan sekolah menjadi aspek penting yang harus ditekankan untuk mengatasi masalah ini. Kejelasan dalam pengelolaan keuangan memastikan bahwa informasi tentang keuangan dan penggunaan dana BOS dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk guru, orang tua siswa, dan masyarakat umum. Sementara itu, akuntabilitas dalam pengelolaan memastikan bahwa sekolah bertanggung jawab atas dana yang diterimanya dan dapat memberikan laporan yang terperinci tentang penggunaan dana BOS. Pengelolaan manajemen keuangan sekolah yang baik, maka dana tersebut akan digunakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Penggunaan dana BOS akan efektif apabila transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini merujuk pada sifat atau kondisi yang memungkinkan sesuatu untuk terlihat jelas atau dapat dipahami tanpa adanya penyembunyian atau penutupan informasi. Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2016). Tujuan transparansi pada dana BOS adalah untuk memastikan bahwa penggunaan dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan dapat diawasi oleh berbagai pihak, termasuk pihak sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat (Wahinun et al., 2019). Diharapkan bahwa dengan tingkat transparansi yang lebih tinggi, pengelolaan dana BOS akan menjadi lebih efektif dalam mengurangi risiko penyalahgunaan serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat.

Keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana BOS memungkinkan semua pihak, termasuk siswa, orang tua, guru dan masyarakat untuk mengawasi dan menilai bagaimana dana tersebut digunakan. Hasil observasi di UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5 menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana BOS belum maksimal. Terlihat dari kurangnya akses masyarakat terhadap informasi anggaran. Melalui penerapan transparansi, sekolah dapat membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan dan memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat. Transparansi yang lebih baik juga dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan yang optimal.

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa sarana dan prasarana adalah tanggung jawab pemerintah, pendapat tersebut menunjukkan sikap yang kurang peduli dari orang tua murid terhadap pendidikan. Namun, penting untuk dipahami bahwa akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban entitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodic (Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM), 2015). Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Mubin, 2018). Akuntanbilitas memastikan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut benar-benar memenuhi kewajibannya secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada konteks dana BOS ini, akuntabilitas mencakup penyelenggaraan keuangan yang jelas, pelaporan yang tepat waktu dan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan dana.

Hasil observasi yang peneliti temukan di UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5 tingkat tata kelola yang berkaitan dengan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan di sekolah belum optimal. Hal ini ditunjukan oleh ketidakpuasan publik terhadap sekolah, kurangnya kemampuan staff pengelola keuangan dalam menyusun laporan keuangan dan kurangnya perhatian sekolah untuk memberikan akses publik dalam menilai penyelenggaraan dan kegiatan-kegiatan sekolah. Penerapan akuntabilitas, skateholder seperti pihak sekolah dapat memastikan bahwa dana BOS digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah, menghindari penyalahgunaan dana, serta memastikan efektivitas dalam penyaluran dan penggunaan dana BOS (Ufairah & Murtanto, 2023). Akuntabilitas tidak hanya melibatkan proses dan kinerja, tetapi juga pengelolaan keuangan dan hasil yang dihasilkan. Tingkat akuntabilitas keuangan dapat dilihat dari minimnya penyalahgunaan dalam manajemen keuangan yang bertanggung jawab, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan orang tua murid dan anggota sekolah.

Pengelolaan dana pendidikan yang tidak efektif dapat menghambat pencapaian tujuan dari adanya dana BOS, hal tersebut dapat disebabkan oleh sejumlah faktor mulai dari kurangnya pengawasan, ketidakjelasan dalam pelaporan, atau bahkan praktik yang tidak transparan. Hasil observasi di UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5 menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan dana pendidikan guna tercapainya tujuan dana BOS belum maksimal. Terlihat dari kurangnya transparansi dalam pelaporan dan kurangnya keterlibatan pihak terkait dalam struktur keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dana BOS. Mengatasi permasalahan ini, diperlukan penerapan kebijakan yang mendorong transparansi, melibatkan pemangku kepentingan secara aktif dan meningkatkan sistem pelaporan dan pengawasan guna memastikan akuntabilitas yang baik dalam penggunaan dana pendidikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan memiliki peran penting dalam pengelolaan penggunaan anggaran dana BOS. Menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan yang baik, pengelolaan anggaran dana BOS dapat berjalan lebih efesien dan efektif, serta membangun kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan organisasi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Penggunaan Anggaran Dana BOS di UPTD SPF SD Negeri Mintaragen**”.

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Kesadaran sekolah untuk melakukan transparansi penggunaan dana BOS belum maksimal.
2. Tingkat tata kelola yang baik berkaitan dengan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan di sekolah belum optimal.
3. Tingkat pengelolaan dana pendidikan untuk mencapai tujuan dana BOS di sekolah belum maksimal.

## Pembatasan Masalah

Identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah, yaitu:

1. Aspek transparansi yang akan diteliti diukur dengan akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, audit yang independen dan efektif serta keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
2. Aspek akuntabilitas yang akan diteliti diukur dengan kepercayaan dan kepuasan publik, proses pengawasan, audit internal dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
3. Aspek pengelolaan penggunaan anggaran yang akan diteliti diukur dengan perencanaan, pemanfaatan, pelaporan, pertanggungjawaban dan efektivitas.
4. Obyek yang diteliti dibatasi di SD Negeri Mintaragen 5 Kota Tegal.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis transparansi dalam pengelolaan penggunaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5?
2. Bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan penggunaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5?
3. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penggunaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5?

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan analisis transparansi dalam pengelolaan penggunaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan analisis akuntabilitas dalam pengelolaan penggunaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan analisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penggunaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5.

## Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus kontribusi dalam menerapkan proses pengelolaan transparansi, akuntabilitas, dan manajemen keuangan dana BOS dan sebagai acuan bagi sejenis. Serta bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan berbagai permasalahan tentang pengelolaan dana BOS.

1. Manfaat Praktis
2. Bagi Peneliti

 Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu wahana dalam penerapan teori-teori yang diperoleh selama menjalani studi di Universitas Pancasakti Tegal. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pihak lain dan dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya.

1. Bagi Sekolah

 Dapat membantu pihak UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5 dalam pelaksanaan proses pengelolaan dana BOS guna terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini juga dapat memberikan pandangan kritis terhadap praktik pengelolaan dana BOS di lingkungan pendidikan. Hasil penelitian ini juga dapat membantu sekolah untuk mengoptimalkan penggunaan dana, meningkatkan akuntabilitas dan mencapai tujuan pendidikan.

1. Bagi Masyarakat

 Masyarakat khususnya orang tua murid yang selama ini belum mengetahui secara mendalam terhadap kebijakan program dana BOS. Pada sekolah dasar di Mintaragen 5 Kota Tegal, diharapkan akan mendapat informasi dari hasil penelitian ini, sehingga masyarakat mengetahui bentuk program dan mampu menempatkan diri secara proposional pengembangan kualitas pendidikan sekolah.

1. Bagi Pemerintah

 Meningkatkan efisiensi penggunaan dana membantu pemerintah mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan dalam pengelolaan dana BOS, memastikan dana digunakan secara optimal untuk kebutuhan pendidikan.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## Kajian Teori

### Transparansi

1. **Pengertian Transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Mujiono, 2017). Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak berkepentingan.

Transparansi memiliki kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau *public* (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2017). Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan yang dibuat berdasarkan preferensi publik. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal (Oktavia et al. (2022).

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Wahiji et al. 2022). Selain itu, keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan dan merupakan salah satu syarat penting untuk mendapatkan *Good Governance*. Transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintah, maka keadilan (*fairness)* dapat ditumbuhkan” (Rakhmawati 2018).

Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Edowai et al. 2021).

Berdasarkan pengertian transparansi di atas maka dapat di simpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi, informasi tentang kebijakan, proses penyampaian dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai.

1. **Tujuan Transparansi**

Tujuan transparansi dalam pengelolaan dana BOS adalah untuk memastikan bahwa setiap alokasi dan penggunaan dana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.Melalui transparansi, semua pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, hingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait pengeluaran dan perencanaan anggaran. Hal ini bertujuan mencegah penyalahgunaan dan korupsi, memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan. Tujuan transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang dapat dirasakan oleh skateholder dan lembaga adalah(Salle, 2017) :

1. Mencegah seawal mungkin terjadinya penyelewengan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
2. Menghindari terjadinya komunikasi yang salah dan perbedaan persepsi.
3. Memotivasi masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.
4. Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.
5. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan ketentuan, prinsip dan nilai-nilai universal.

Tujuan transparansi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan transparansi dapat meminimalisir penyelewengan penggunaan dana, mencegah ketidak percayaan publik dan tercapainya suatu tujuan.

1. **Manfaat Transparansi**

 Transparansi ditunjukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan kepada sekolah bahwa sekolah adalah organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa. Transparansi juga bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah dan public, melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat. Kebijakan pengawasan dalam dana BOS, sekolah harus memberikan laporan, mau secara langsung ataupun tidak langsung (*online*) agar bisa dilihat semua masyarakat.

 Manfaat transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua, siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Beberapa manfaat penting adanya transparansi menurt Adrianto (Adrianto, 2017) adalah sebagai berikut:

1. Mencegah korupsi.
2. Lebih mudah mengindentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
3. Meningkatkan transparansi sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
5. Menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
6. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.
7. **Ciri-Ciri Transparansi Dalam Pengelolaan Dana BOS**

Transparansi terlihat dalam keterbukaan informasi yang mencakup detail alokasi dan penggunaan dana, aksesibilitas data bagi semua pihak terkait, serta keterlibatan publik dalam proses pemantauan dan evaluasi. Selain itu, transparansi juga melibatkan adanya sistem pelaporan yang jelas dan rutin, serta mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan atau kekhawatiran. Penerapkan ciri-ciri tersebut, pengelolaan dana BOS dapat dilakukan dengan lebih efektif, mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang adil dan berkualitas. Transparansi dalam pengelolaan dana BOS memiliki ciri-ciri sebagai berikut(Hasibuan & Sari, 2021) :

1. Keterbukaan kebijakan keuangan
2. Keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya
3. Keterbukaan dalam penggunaan keuangan dan pertanggung jawabannya.

Penerapan ciri-ciri transparansi ini, diharapkan pengelolaan dana BOS dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga tujuan utama dari program BOS, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dapat tercapai secara maksimal.

1. **Transparansi Dalam Pengelolaan Dana BOS**

Pengelolaan dana BOS yang transparan merupakan salah satu wujud nyata dalam mendukung terciptanya pendidikan yang berkualitas dan merata, menurut undang-undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 34, ayat (1) bahwa “Pengelolaan dana BOS harus dilakukan dengan akuntabilitas yang kuat, transparan dan efektif”. Berikut langkah-langkah yang dapat dicapai:

1. Informasi yang jelas

Sekolah harus menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai penggunaan dana BOS, termasuk rencana Penggunaan dana, proses pengelolaan, dan hasil yang dicapai.

1. Keterbukaan dalam keputusan

Proses pengambilan Keputusan terkait penggunaan dana BOS dilakukan secara terbuka, melibatkan semua pihak yang terkait dan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

1. Laporan keuangan transparan

Sekolah perlu menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara terperinci dan transparan yang mencakup penggunaan dana BOS, pengeluaran serta hasil yang dicapai.

1. Akses informasi

Sekolah harus memberikan akses yang mudah bagi masyarakat, orang tua siswa dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh informasi tentang penggunaan dana BOS dan kinerja sekolah.

1. Pertanggungjawaban

Sekolah harus siap untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana BOS kepada semua pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dan masyarakat.

 Upaya menerapkan langkah-langkah tersebut, transparansi dalam pengelolaan dana BOS dapat ditingkatkan, sehingga memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

1. **Petunjuk Teknis Transparansi**

Transparansi dalam pengelolaan dana BOS diatur melalui beberapa peraturan yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi. Salah satu peraturan terbaru yang mengatur aspek transparansi adalah (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah). Peraturan ini menetapkan bahwa informasi mengenai penggunaan dana BOS harus dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, termasuk rincian anggaran dan laporan penggunaan dana.

1. **Dimensi Transparansi**

Dimensi transparansi tidak hanya penting untuk kepercayaan public, tetapi juga penting untuk menciptakan lingkungan yang adil dan efisien dalam berbagai sektor. Mengedepankan dimensi transparansi, organisasi dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2019) yaitu informatif. Makna dari informatif disini sebagai berikut :

1. Jelas, yaitu informasi yang disampaikan jelas dan mudah dipahami.
2. Tepat waktu, yaitu pelaporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar bisa digunakan untuk acuan dasar pengambilan keputusan.
3. Memadai, yaitu dalam penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan memuat pengungkapan informasi yang memadai dan pengungkapan meterial tersebut
4. Akurat, yaitu informasi yang disampaikan harus benar dan tidak terdapat kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan asimetri informasi.
5. Mudah diakses, yaitu adanya kemudahan dalam mengakses informasi untuk pihak yang memerlukan.
6. Dapat diperbandingkan, yaitu di dalam laporan keuangan setidaknya harus dapat diperbandingkan antar-periode dan dengan instansi yang sejenis. Sehingga daya banding tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat kinerja antar instansi yang sejenis lainnya.
7. **Indikator Keberhasilan Tranparansi**

Indikator transparansi mengukur sejauh mana informasi disampaikan secara jelas dan terbuka kepada publik. Indikator transparansi memberikan gambaran tentang tingkat keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Keberhasilan transparansi suatu lembaga ditunjukan oleh indikator sebagai berikut (Setiyaningrum, 2017):

1. Mudahnya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
2. Terdapat keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses anggaran).
3. Diumumkannya setiap kebijakan anggaran.
4. Dipublikasikannya setiap hasil laporan anggaran (yang telah diauditkan oleh lembaga yang berwenang)
5. Terdapat dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiskal.
6. Terbukannya informasi tentang pembelajaran akrual.
7. Pengawasan audit yang independen dan efektif
8. Terdapat lembaga audit yang independen dan efektif.
9. Terdapat kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.
10. Terdapat sistem peringatan dini dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
11. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran
12. Terdapat keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.
13. Terdapat kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

### Akuntabilitas

1. **Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja serta tindakan penyelanggaran organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Mubin, 2018). Akuntabilitas berasal dari istilah dalam Bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas menyatakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan. Kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segalan aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. (Rakhmawati (2018).

Berdasarkan dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan dalam pengelolaan sumber daya baik dalam konteks individu, organisasi maupun pemerintah.

Ada tiga pilar yanng menjadi persyaratan terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

1. Terdapat transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan mengikut sertakan sebagai komponen dalam mengelola sekolah.
2. Terdapat standar kinerja disetiap institusi yang diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.
3. Terdapat partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanaan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayaan yang cepat.
4. **Tujuan Akuntabilitas**

Tujuan akuntabilitas pendidikan adalah agar teriptanya kepercayaan publik terhadap sekolah. Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen sekolah. Sekolah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat (Marinah et al., 2023)

Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya (Marmoah, 2020).

Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik. Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk memastikan transparansi, integritas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya dan pelaporan keuangan suatu lembaga. Akuntabilitas membantu memastikan bahwa informasi keuangan akurat dan dapat dipercaya serta memfasilitasi pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait.

1. **Manfaat Akuntabilitas**

Manfaat akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sangat penting untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan tepat sasaran. Akuntabilitas yang baik, setiap pengeluaran dan keputusan terkait dana BOS dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada organisasi dimaksudkan untuk (Syahdika, 2021) :

1. Menumbuhkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
2. Memotivasi terciptanya transparansi dan *responsiveness* organisasi.
3. Mendorong partisipasi masyarakat.
4. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan *responsive* terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
5. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
6. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat akuntabilitas dapat menjamin kepercayaan publik, terciptanya keterbukaan informasi dan meningkatkan suasana kerja yang kondusif.

1. **Pelaksanaan Akuntabilitas Pendidikan**

Pelaksanaan akuntabilitas ditekankan pada guru, administrator, orang tua siswa dan masyarakat serta orang-orang luar lainnya. Perencanaan *participatory*, yaitu perencanaan yang ditunjukan pada sejumlah personil sebagai berikut :

1. Manajer/administrator/ketua lembaga, sesuai dengan fungsinya sebagai manajer.
2. Ketua perencana, yang dianggap paling bertanggungjawab atas keberhasilan perencaan. Ketua perencana adalah dekan, rektor, kepala sekolah, atau pimpinan unit kerja lainnya.
3. Para anggota perencana, mereka dituntut memiliki akuntabilitas karena mereka bekerja mewujudkan konsep perencanaan dan mengendalikan implementasinnya di lapangan.
4. Konsultan, para ahli perencana yang menjadi konsultas,
5. Para pemberi data, harus memberi performan yang kuat mengingat tugasnya memberikan dan menginformasikan data yang selalu siap dan akurat (Salim & Barlian, 2018).
6. **Upaya-upaya Peningkatkan Akuntabilitas**

Upaya-upaya peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap alokasi dan penggunaan dana dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab. Ada delapan hal yang harus dikerjakan oleh sekolah untuk peningkatan akuntabilitas, yaitu :

1. Sekolah harus menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
2. Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban.
3. Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik/ stakeholder diawal setiap tahun anggaran.
4. Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada stakeholder.
5. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/stakeholder diakhir tahun.
6. Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik.
7. Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan,
8. Memperbaharui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

Kedelapan upaya di atas, semuanya bertumpu pada kemampuan dan kemauan sekolah untuk mewujudkannya. Jika sekolah mengetahui sumber dayanya, maka dapat lebih mudah digerakkan untuk mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas sekolah. Upaya peningkatkan akuntabilitas dapat melibatkan penerapan sistem pelaporan yang transparan, audit reguler oleh pihak independen, serta menguatkan kontrol internal dalam organisasi atau lembaga (Trisnawati, 2018).

1. **Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana BOS**

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan terpercaya menurut undang-undang Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 34, ayat (1) bahwa “Pengelolaan dana BOS harus dilakukan dengan akuntabilitas yang kuat, transparan dan efektif”. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembuatan rencana penggunaan dana

Sekolah harus membuat rencana penggunaan dana BOS yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan sekolah serta peraturan yang berlaku.

1. Pelaksanaan pengelolaan dana

Penggunaan dana harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disetujui dan dalam batas-batas yang telah ditetapkan.

1. Pemantauan dan pengawasan

Sekolah perlu melakukan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan dana, termasuk memeriksa bukti pengeluaran dan memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Pelaporan keuangan

Sekolah harus menyusun laporan keuangan secara berkala yang mencerminkan penggunaan dana BOS dengan jelas dan transparan.

1. Evaluasi dan pertanggungjawaban

Evaluasi terhadap hasil penggunaan dana BOS perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan dana, serta untuk memastikan pertanggungjawaban yang tepat kepada semua pemangku kepentingan.

1. **Petunjuk Teknik Akuntabilitas**

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS diatur oleh (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 174/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah). Peraturan ini menekankan bahwa setiap penggunaan dana BOS harus disertai dengan laporan akuntabilitas yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap sekolah diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban secara periodik dan memastikan laporan tersebut sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku.

1. **Dimensi Akuntabilitas**

Menilai dimensi akuntabilitas membantu organisasi untuk mengidentifikasi kelemahan dan memperkuat sistem kontrol internal mereka. Dimensi akuntabilitas tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari pemangku kepentingan melalui proses yang terbuka dan jujur. Terdapat 4 (empat) dimensi dari indikator akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

1. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan kepatuhan terhadap prosedur, adanya pelayanan publik yang responsif dalam hal sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur akuntansi.

1. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan program yang memberikan hasil yang optimal dan mempertimbangkan apakah alternatif program akan memberikan hasil yang optimal.

1. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pemerintah pusat atau daerah terhadap kebijakan yang diambil (S. A. Andayani et al., 2020).

1. **Indikator Keberhasilan Akuntabilitas**

Indikator akuntabilitas memberikan gambaran tentang tingkat keterbukaan dan tanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan. Menguatkan akuntabilitas melalui indikator yang jelas dapat meningkatkan kepercayaan publik. Indikator untuk mengukur berhasil atau tidaknya akuntabilitas dalam manajemen sekolah, dapat dilihat dari beberapa hal. Sebagaimana dinyatakan oleh Slamet, berikut beberapa indikator keberhasilan akuntabilitas:

1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah.
2. Tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai terhadap penyelanggaraan pendidikan di sekolah, dan
3. Meningkatkan kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

Ketiga indikator di atas, dapat dipakai sekolah untuk mengukur apakah akuntabilitas manajemen sekolah telah mencapai hasil sebagaimana yang dikehendaki (Salim & Barlian, 2018). Pengukuran berdasarkan indikator ini memungkinkan sekolah untuk membuktikan kepada pemangku kepentingan bahwa mereka telah mengelola dana dengan bertanggung jawab.

### Pengelolaan Dana BOS

1. **Pengertian Dana Bos**

 BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non operasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar (Aceh, 2017). Sebagaimana tertuang dalam PP No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

 Dana BOS adalah bantuan yang diberikan pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun (Depiani, 2015). Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu.

Secara umum, proses pengelolaan anggaran dana BOS meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan merupakan inti dalam pelaksanaan proses penganggaran dana BOS. Pengelolaan merupakaan suatu proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Zahruddin, 2019). Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur bahwa di dalam pengelolaan ada proses, ada kegiatan yang rasional dan sistematis serta adanya tujuan yang akan dicapai. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOS adalah serangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penggunaan dana yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar dan menengah (Sudjana, 2015).

Pengelolaan dalam penganggaran dana BOS bertujuan untuk mengarahkan agar kegiatan yang dilaksanakan tudak menyimpang dari arah yang ditentukan. Yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan anggaran dana BOS antara lain menganalisis program kegiatan dan prioritasnya, menganalisis dana yang ada dan mungkin diadakan dari berbagai sumber pendapatan dan dari berbagai kegiatan.

Pengelolaan dana BOS menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah Menurut Permendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Juknis BOS, dikatakan bahwa BOS dikelola oleh SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMALB/SMK dan SLB dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pertanggungjawaban program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi untuk pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikut sertakan kepala sekolah, bendahara dewan guru dan komite sekolah sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi berarti keterbukaan (*open process*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait membutuhkan informasi. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaran pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil hasil yang dicapai.

1. **Tujuan Dana BOS**

Secara umum tujuan Dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka program wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu. Indikator efektivitas program sebagai berikut:

1. Ketetapan Sasaran Program

Pada indikator ini melihat sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan

1. Sosialisasi Program

Sosialisasi Program ini merupakan kemampuan dari penyelenggara program dalam melakukan penyuluhan terkait dengan program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada publik.

1. Tujuan Program

Tujuan program ini dilihat sejauh mana keselarasan antar hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Pemantauan Program

Kegiatan ini dilakukan setelah terlaksanannya program yang ingin dijalankan sebagai bentuk pengevaluasian program (Kowaas et al., 2017).

1. **Sasaran Program Dana BOS**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknik Penggunaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Sekolah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2015 pasal 2 bagian (a) menyatakan bahwa penggunaan dana BOS tepat sasaran dalam mendukung program wajib belajar 9 tahun secara efektif dan efisien, serta bagian (b) menyatakan pertanggung jawaban keuangan dana BOS dilaksanakan sesuai dengan dan berdasarkan tertib administrasi transparansi, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan dalam keuangan dana BOS (Petunjuk Teknik Penggunaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekolah Dana Bantuan Operasional Sekolah, 2015).

1. **Waktu Penyaluran Dana BOS**

Kemendikbud RI memaparkan bahwa aturan Penyaluran dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) Reguler akan dilakukan pada tahun 2024 dalam dua tahapan. Tahap 1 akan disalurkan sebesar 50% pada awal Januari, selanjutnya Tahap 2 yaitu sebesar 50% akan disalurkan paling cepat bulan juli melalui rekening satuan pendidikan(Isnaini & Desi Aramana, 2021).

Laporan keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2023 merupakan prasyarat untuk distribusi tahap 1 Tahun Anggaran 2024. Dalam kata lain pelaporan tahunan merupakan persyaratan untuk distribusi penyaluran dana BOS tahap selanjutnya. Laporan tahap 1 merupakan prasyarat penyaluran untuk merealisasikan minimal 50% dari dana tahap 2. Laporan tahap 2 merupakan prasyaratan penyaluran untuk merealisasikan minimal 50% dari dana tahap 1 tahun berikutnya. Perlu diketahui bahwa Kemendikbud menawarkan aplikasi RKAS sebagai opsi pelaporan. Kerangka waktu untuk menyerahkan laporan telah ditetapkan, dengan:

1. Laporan Tahap 1 yang jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2024, dan
2. Laporan Tahap 2 jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2024
3. **Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah**

Penerima dana BOS harus memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui, dengan prioritas pada peningkatan mutu pendidikan. Sekolah yang layak menerima dana BOS adalah sekolah yang aktif melaporkan penggunaan dana secara berkala dan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Ketentuan sekolah yang berhak menurut BOS yaitu:

1. Semua sekolah SD/SDLB/SMP negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua, atau wali peserta didik.
2. Bagi sekolah yang mengolah BOS harus memiliki persetujuan orang tua siswa melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin disekolah tersebut.
3. Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
4. Sekolah negeri dikategorikan RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan komite sekolah. Pemerintah harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut agar tercipta prinsip pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.
5. Sekolah negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI dan SBI tetap diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah serta menggratiskan siswa miskin (Nurhayati & Deonardo, 2021).
6. **Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah**

Penerima dana BOS wajib sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak boleh dialihkan untuk keperluan lain tanpa izin dari pihak berwenang. Adapun larangan penggunaan dana BOS adalah sebagai berikut:

1. Disimpan dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membeli *software*/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau perangkat sejenis.
4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, antara lain subsidi banding, *study tour* (karya wisata), dan sejenisnya.
5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya.
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
7. Membiayai akomodasi untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang dan lainnya.
8. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
9. Digunakan untuk rehabilitas sedang dan berat.
10. Membangun gedung/ruang guru, kecuali pada SMP yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan atau kantin sehat.
11. Membeli lembar kerja siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
12. Menanamkan saham.
13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau sumber lainnya.
14. Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan membiayai penyelenggaraan upacara atau acara keagamaan dana atau membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/ perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan atau kementerian pendidikan dan kebudayaan (Adit, 2020).
15. **Petunjuk Teknik Pengelolaan Dana BOS**

Pengelolaan dana BOS diatur dalam (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah). Peraturan ini menguraikan prosedur dan mekanisme pengelolaan dana BOS yang meliputi alokasi, penggunaan, dan pelaporan dana. Ini termasuk perincian mengenai tanggung jawab sekolah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana.

1. **Dimensi pengelolaan dana BOS**

Sekolah yang berhasil dalam pengelolaan dana BOS cenderung memiliki program pembelajaran yang lebih berkualitas dan memadai, serta mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Oleh karena itu terdapat dimensi pengelolaan dana BOS (Kusno et al. (2019) meliputi :

1. Pengelolaan dana BOS: Pengelolaan dana BOS melibatkan pengaturan dan penggunaan dana BOS yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Pengelolaan dana BOS meliputi pengelolaan anggaran, penggunaan dana, pelaporan, pertanggungjawaban, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.
2. Sumber dana BOS: Sumber dana BOS berasal dari pemerintah, yang disalurkan ke sekolah untuk membantu pengelolaan dan pengembangan pendidikan. Sumber dana BOS dapat digunakan untuk pembelian dan pemasangan fasilitas, pembelanjaan biaya administrasi, biaya pengembangan guru dan biaya pembelajaran lainnya.
3. Sistem informasi dan keuangan: Sistem informasi dan keuangan, seperti Aplikasi Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), digunakan untuk mendukung pengelolaan dana BOS. Sistem ini membantu dalam pengaturan anggaran, pengguanaan dana, pelaporan dan pertanggungjawaban.
4. Kebijakan dan peraturan: Pengelolaan penggunaan dana BOS harus dilakukan sesuai dengan kebijakan dan peraturan pemerintah. Pengelolaan dana BOS harus transparan, efektif dan akuntabel.
5. Kinerja dan evaluasi: Pengelolaan penggunaan dana BOS harus dilakukan dengan kinerja tinggi dan efektif. Pengelolaan dana BOS harus idevaluasi secara terus menerus untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
6. Sumber daya keberhasilan: Pengelolaan penggunaan dana BOS harus mendukung sumber daya keberhasilan, seperti manusia, keuangan dan waktu. Pengelolaan dana BOS harus dilakukan dengan kinerja yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana.
7. Pelaporan dan pertanggung jawaban: Pengelolaan penggunaan dana BOS harus dilakukan dengan pelaporan yang transparan dan pertanggungjawaban yang jelas. Pengelolaan dana BOS harus dijelaskan secara terbuka kepada sekolah dan pemerintah.
8. **Indikator keberhasilan pengelolaan dana BOS :**

Indikator pengelolaan dana BOS mencakup keberlanjutan suatu program, di mana sekolah mampu menjaga kualitas program yang telah dijalankan dengan dana tersebut. Terdapat indikator keberhasilan pengelolaan dana BOS meliputi (Jaya, 2016):

1. Perencanaan: Menyusun RAPBS (Rencana Anggaran dan Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah) yang mencakup sumber pendapatan, jumlah nominal, dan pembelanjaan dana BOS dalam satu tahun anggaran.
2. Pemanfaatan: Penggunaan dana BOS yang sesuai dengan RAPBS dan petunjuk teknis penggunaan dana BOS.
3. Pelaporan: Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS kepada sekolah dan pemerintah secara terbuka.
4. Pertanggungjawaban: Kesesuaian penggunanaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada sekolah dan pemerintah.
5. Efektivitas: Peningkatan kualitas pembelajaran dan pendidikan melalui penggunaan dana BOS.

## Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu memainkan peran dalam menyusun dan menyempurnakan penelitian saat ini, menyediakan landasan ilmiah yang kuat untuk memahami dan mengevaluasi hasil penelitian yang ada. Penelitian terdahulu tidak hanya berfungsi sebagai referensi, tetapi juga sebagai sumber inspirasi yang memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan penelitian yang lebih mendalam dan menyusun pendekatan yang lebih terarah. Oleh karena itu, integrasi temuan dari berbagai penelitian terdahulu sangat penting untuk memastikan bahwa penelitian baru memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengetahuan ilmiah dan praktis dalam bidang tersebut. Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk memperkaya bahan kajian penelitian penulis. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu:

1. Top of Form
2. Bottom of Form

Tabel 2. 1

Kajian Terdahulu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peneliti dan Tahun** | **Judul Peneliti** | **Perbedaan** | **Hasil Penelitian** |
| 1. | Mujiono, (2017) | “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi” | Penelitian yang dilakukan oleh Mujiono 2017 yaitu pada objek penelitian, dimana penelitian mujiono dilaksanakan di SMP Negeri 4 Banjar. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya kesesuain aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada sekolah, Dinas Pendidikan Kota Banjar dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan pemerintah atau petunjuk teknis dalam pengelolaanya sehingga tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 4 Banjar. Ada saling keterkaitan antara transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dapat mendorong peningkatan akuntabilitas Pengelolaan dana BOS. Sedangkan akuntabilitas public akan sulit terlaksanaterlaksana tanpa adanya transparansi |
| 2. | Sakti (2022) | “Analisis tranparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Studi kasus pada SMP Negeri 3 Bogor)”. | Penelitian yang dilakukan oleh Kunto Gemilang Sakti 2022 yaitu pada objek penelitian, dimana penelitian Kunto dilaksanakan di SMP Negeri 3 Bogor. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sudah sangat baik, yaitu dengan adanya RKAS dalam perencanaan dana BOS, kesesuaian aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaksanaan pelaporan dan pertanggung jawaban dana BOS kepada sekolah. Standar Nasional Pendidikan (SNP) di SMP Negeri 3 Bogor dengan nilai 6,12. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah sudah sangat baik dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan pemerintah atau petunjuk teknis penggunaan dana BOS. |
| 3. | Ramdhani (2022) | “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)”. | Penelitian yang dilakukan oleh Riski Fauzi Ramdhani 2022 yaitu pada objek penelitian, dimana penelitian Riski Fauzi Ramdhani dilaksanakan di MAN 5 Ciamis. | Hasil dari penelitian menunjukan penerapan prinsip akuntabilitas dan transpransi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)MAN 5 Ciamis sejauh ini sudah cukup baik, hal ini dikarenakan: Adanya laporan pertanggung-jawaban ke pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya transparansi penge-lolaan dana sekolah ke pihak-pihak terkait serta dilibatkannya stakeholder sekolah yang lain dalam mengelola dana. Adanya informasi penerimaan dan penggunaan dana BOS dalam media yang ada. Akuntabilitas pengelolaan dana keuangan di MAN 5Ciamis sudah baik. |
| 4. | Yunita & Perdanawati, (2020) | “Analisis Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Klungkung“. | Penelitian yang dilakukan oleh Ria Yunita dan Luh Putu Virra Indah Perdanawati 2020 yaitu pada objek penelitian, dimana penelitian Ria Yunita dan Luh Putu Virra Indah dilaksanakan di Madrasah Ibtidiyah Negeri (MIN) Klungkung. | Hasil dari penelitian menujukan Penerapan Prinsip Akuntabilitaspengelolaan Dana BOS pada MIN Klungkung mengenai perencanaan,penggunaan, pertanggungjawaban serta pengarsipan Dana BOS dilakukandengan baik dengan baik semestinya. Serta dalam penerapan prinsip Transparansi dalam perencanaan, penggunaan serta publikasi laporanpenggunaan dana BOS dilakukan dengan terbuka. |
| 5. | Naslikhah et al. (2022) | “Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SDN Sawocangkring, Wonoayu, Sidoarjo”. | Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminatun Naslikhah dkk 2022 yaitu pada objek penelitian, dimana penelitian Siti Aminatun Naslikhah dkk dilaksanakan di SDN Sawocangkring, Wonoayu, Sidoarjo. | Hasil dari penelitian tersebut menunjukan dalam Pelaksanaan akuntabilitasserta transparansi dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah diSDN Sawocangkring telah berlangsung secara efektif, Gambaran akuntabilitas pengelolaan BOS pada SDNSawocangkring berbentuk laporan ikhtisar rencana keuangan biaya tiapbulan dan laporan caturwulan, serta penerapan transparansi penulisanrencana kegiatan dan anggaran sekolah yang diawali melalui musyawarahdengan tim BOS yang ada sekolah |

 Berdasarkan dari ke lima hasil penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tempat penelitian dan indicator keberhasilan.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelanggaraan dana BOS. Lembaga pendidikan yang tidak transparan akan menimbulkan kecenderungan public berpikir negative. Keterbatasan akses informasi yang diberikan akan membuat publik merasa tidak percaya terhadap lembaga pendidikan yang ada.

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban dalam pengelolaan dana BOS. Lembaga pendidikan yang tidak akuntabel akan menimbulkan dampak negatif dan kecurigaan publik terhadap pengambilan Keputusan dan kebijakan yang dilakukan. Publik akan berpikir bahwa lembaga pendidikan yang ada tidak professional dan menduga adanya kecurangan dalam pengelolaan dana BOS pada lembaga pendidikan tersebut.

Lembaga pendidikan yang transparan akan menimbulkan dampak positif terhadap publik. Keterbukaan dan kebebasan akses informasi yang diberikan oleh lembaga pendidikan akan membuat publik semakin percaya. Selain itu, lembaga pendidikan yang akuntabel akan menimbulkan dampak positif dan kepercayaan public terhadap pengambilan Keputusan dan kebijakan yang ada. Dengan demikian pengelolaan dana BOS akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan sistem pendidikan rasional yang ada.

Kerangka pikir merupakan gambaran umum dari cara sebuah penelitian berlangsung secara logis. Kerangka pikir ini dibentuk dengan merujuk pada pernyataan penelitian dan menggambarkan hubungan antara beberapa konsep yang relevan. Konteks penelitian yang berjudul "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Penggunaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)", kerangka pemikiran akan menguraikan bagaimana implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Berikut adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini:

DANA BOS

AKUNTABILITAS

TRANSPARANSI

PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA BOS

* Informasi dana BOS lebih transparan.
* Pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan anggaran dana BOS.
* Pengelolaan anggaran dana BOS yang efisien, perencanaan yang baik dan pengawasan yang ketat.

Bagan 2. 1 Kerangka Pikir

## 2.4 Pertanyaan Penelitian

 Pertanyaan penelitian merupakan penjabaran dari rumusan masalah, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

* + - 1. Bagaimana sekolah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS, termasuk proses publikasi laporan pertanggungjawaban kepada publik serta keterlibatan komite sekolah dan orang tua murid dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban?
			2. Bagaimana sekolah melaksanakan proses pengawasan penggunaan dana BOS dan melakukan sosialisasi perencanaan penggunaannya kepada para pemangku kepentingan?
			3. Bagaimana sekolah memastikan akuntabilitas yang jujur serta mengimplementasikan program dan proses untuk menjamin penggunaan dana BOS secara efektif dan sesuai dengan tujuannya?
			4. Bagaimana sekolah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS, termasuk proses publikasi laporan pertanggungjawaban kepada publik serta keterlibatan komite sekolah dan orang tua murid dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban?
			5. Bagaimana keseluruhan proses pengelolaan dana BOS di sekolah ini, mulai dari pencairan dan penyaluran dana, mekanisme pengambilan keputusan dalam alokasi untuk program kegiatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaannya?
			6. Bagaimana sistem pencatatan dan pembukuan penggunaan dana BOS dilaksanakan, dan siapa saja pihak yang terlibat dalam proses evaluasi serta penilaian kinerja pengelolaannya?

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2019) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, bendahara 1, bendahara 2 komite dan orang tua murid.

Fokus peneliti dalam penggunaan penelitian kualitatif ini karena memudahkan peneliti dalam menggambarkan, menganalisis serta menyimpulkan sebuah data. Berkaitan dengan pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami secara mendalam serta berupaya untuk menggambarkan bagaimana implementasi akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5.

Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan, sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Desain yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah studi kasus, dimana pengujian secara rinci terhadap suatu program, peristiwa, aktivitas dan proses.

Analisis transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan penggunaan anggaran dana BOS di UPTD SPF SD Negeri Mitaragen 5

Kajian Teori

Masalah

Analisis Data

Reduksi Data

Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi

Penarikan Kesimpulan

Penyajian Data

Bagan 3. 1 Desain Penelitian

Keterangan:

 Melihat bagan di atas, penelitian bermula dari dasar implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penggunaan anggaran dana BOS di UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5 kemudian ditemukanlah berbagai masalah yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Selanjutnya, peneliti mengkaji masalah dengan beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian serta melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai sumber data penelitian guna menguji kredibiltas data. Selanjutnya, peneliti melakukan reduksi data yang meliputi analisis data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

## Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dikenal sebagai prosedur penelitian. Menurut Moleong (2021), penelitian ini terdiri dari empat tahap, yaitu tahap pra lapangan, tahap kerja lapangan, tahap analisis data dan tahap penulisan laporan. Peneliti menjalani tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Menyiapkan rencana penelitian, memperoleh izin yang diperlukan, melakukan survey lokasi, menyiapkan peralatan penelitian, memilih serta merekrut partisipasi penelitian, serta menangani aspek etika merupakan bagian dari tahap pra lapangan.
2. Selama tahap kerja lapangan, aktivitas yang mencakup pengumpulan informasi terkait dengan permasalahan penelitian dilakukan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi diterapkan untuk memperoleh data yang diperlukan.
3. Tahap analisis data, proses melibatkan evaluasi hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan seleksi data yang relevan dan memadukan hasil tersebut. Selanjutnya, peneliti akan menjalankan proses trangulasi untuk memvalidasi temuan. Data diperiksa ulang terhadap Lokasi dan metode pengumpulan data guna memastikan keabsahan, memverifikasi bahwa data tersebut benar-benar valid.
4. Penyusunan hasil penelitian dari seluruh kegiatan yang telah direncanakan, termasuk perencanaan penelitian, pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan, merupakan bagian dari tahap penulisan laporan.

## Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, kata dan tindakan diperoleh melalui teknik catat dan rekam. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari pengamatan saat peneliti melakukan observasi. Selain itu juga diperoleh dari wawancara oleh guru yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS.

Ada dua sumber data peneltian yang diteliti, yaitu sumber data primer dan sekunder sebagaimana dijelaskan berikut ini:

* 1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung pada saat di lapangan. Adapun data primer bersumber dari hasil wawancara, dan observasi langsung dengan beberapa responden.

* 1. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen, arsip dan berbagai sumber penunjang lainnya. Data yang digunakan peneliti yaitu dokumentasi, dan kajian pustaka dari literatur pendukung penelitian mengenai implementasi tranparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penggunaan anggaran dana BOS. Penelitian ini peneliti memperoleh data berupa catatan pencairan dana BOS, catatan pembelanjaan dana BOS, dan catatan pelaporan dana BOS.

## Wujud Data

Wujud data penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, gambar dan angka-angka yang tidak dihasilkan melalui pengelolaan statistik. Wujud data dalam penelitian ini ada dua, antara lain:

* + - 1. Data atau informasi

Data atau informasi diperoleh dari wawancara langsung antara peneliti dengan informan penelitian. Data atau informasi dari orang yang diwawancarai diamati dan dicatat melalui catatan tertulis. Data atau informasi yang dimaksud adalah data atau informasi dari hasil wawancara langsung kepada kepala sekolah, bendahara 1, bendahara 2, komite dan orang tua murid pengelolaan anggaran dana BOS di UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5.

1. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud seperti buku pegangan, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Sumber penelitian ini tertulis berupa buku catatan keluar/masuk dana BOS, catatan pembelanjaan dana BOS, dan catatan pelaporan dana BOS, serta dokumen lain yang penting dalam mendukung penelitian ini.

## Identifikasi Data

Data yang diidentifikasikan adalah semua data yang terhimpun dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi pada UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5. Pada penelitian ini terdiri dari dua data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

Data Sekunder

Data Primer

Berupa dokumen, foto dan bahan lain yang mendukung penelitian tentang pengelolaan dana BOS

Wanwancara dengan kepala sekolah, bendahara 1, bendahara 2, dan komite sekolah.

Identifikasi Data

Bagan 3. 2 Indetifikasi Data

## Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

 Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Sudjana, 2020). Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang dimiliki. Observasi dalam arti luas, sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

 Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain (Sugiyono, 2020). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan teknik observasi merupakan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

 Sebelum proses observasi berlangsung, peneliti mempersiapkan pedoman observasi yang akan diobservasi pada saat peneliti melakukan pengamatan dilapangan.

Tabel 3. 1

Pedoman Lembar Observasi

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **Aspek yang diamati** |
| 1. | Transparansi* Ketersediaan informasi tentang alokasi dana BOS.
* Keterbukaan dalam penyusunan anggaran dana BOS.
* Ketersediaan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.
* Akses public terhadap informasi penggunaan dana BOS.
 |
| 2. | Akuntabilitas* Kesesuaian penggunaan dana BOS dengan rencana anggaran.
* Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.
* Pengawasan internal dan ekternal dalam pengelolaan dana BOS.
 |
| 3. | Pengelolaan Penggunaan Anggaran dana BOS* Pemantauan dan evaluasi penggunaan dana BOS.
* Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.
* Dampak penggunaan dana BOS terhadap kualitas pendidikan.
 |

 Sumber : (Andayani et al., 2023; Mardiasmo, 2019)

1. Wawancara

 Wawancara merupakan percakapan antara peneliti (seorang yang ingin mendapatkan informasi) kemudian informan (seseorang yang dinilai mempunyai informasi penting terhadap satu objek) (Kriyantono, 2020). Wawancara juga digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2019)

 Proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur, wawancara terstruktur adalah pertanyaan yang mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan. Pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai implementasi transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan penggunaan anggaran dana BOS di SD Mintaragen 5 Kota Tegal.

 Sebelum proses wawancara berlangsung, peneliti mempersiapkan pedoman wawancara yang akan ditanyakan kepada responden terkait masalah penelitian.

Tabel 3. 2

Pedoman Wawancara

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Variabel** | **Aspek yang ditanyakan** | **Butir Pertanyaan** |
| 1. | Transparansi | -Informasi yang mudah diakses-Akurat dan jelas-Pengawasan audit yang efektif-Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran | 5 |
| 2. | Akuntabilitas | -Kebijakan dan kejujuran-Program dan proses-Kesesuaian kegiatan sekolah dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat | 5 |
| 3. | Pengelolaan Dana BOS | -Perencanaan, pemanfaatan, pelaporan, pertanggungjawaban-Kinerja dan evaluasi  | 5 |

Sumber : (Ismi, 2017; Jaya, 2016; Kusno et al., 2019)

 Fokus wawancara dalam penelitian ini melibatkan kepala sekolah, bendahara 1, bendahara 2, komite sekolah dan wali murid di UPTD SPF SD Negeri Mintaragen 5.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka juga gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

## Pengujian Kualitas Data

* 1. Metode Triangulasi Sumber Data

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi sumber data adalah untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2016).

* 1. Metode Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Triangulasi teknik ini dilakukan untuk menguji data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data penelitian diperoleh dengan melakukan teknik wawancara secara mendalam, teknik observasi secara langsung, serta teknik dokumentasi.

## Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara dan catatan kecil di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data kualitatif menggunakan metode analisis dari Sugiyono (2017) yang terdiri dari empat unsur yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, berikut penjelasannya:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Fokus utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif berupa pengumpulan data dengan observasi, wawancara serta dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, mulai proses memilah data, membuat tema-tema, mengkatagorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dapat dikelompokan sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah direduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian.

1. *Data Display* (Penyajian Data)

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk urairan kalimat, bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

1. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan. Maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat serta faktual. Dimulai dengan melakukan pengumpulan data, seleksi data, trianggulasi data, pengkategorian data, deskripsi data hingga penarikan kesimpulan. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi disajikan dengan bahasa yang tegas untuk menghindari bias. Melakukan pengkategorian secara tematik, lalu disajikan ke dalam bagian-bagian deskripsi data yang dianggap perlu untuk mendukung pernyataan-pernyataan penelitian. Kesimpulan ditarik dengan teknik induktif tanpa mengeneralisir satu temuan terhadap temuan-temuan lainnya diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian.

 Kesimpulan pada penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, namun juga tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu obyek yang masih gelap setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

## Teknik Penyajian Hasil Analisis

Hasil analisis data dalam penelitian ini disajikan dengan menggunakan metode penyajian informal. Penyajian hasil analisis data secara informal adalah penyajian hasil analisis data dengan menggunakan kata-kata yang biasa. Sistematika dalam penyajian ini, yaitu kaidah disampaikan dengan uraian.